

ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diatur pada Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Di Bandung sendiri telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah berupa SIMDA sejak tahun 2008 sebagai usaha Pemda untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengelolaan aset daerah. Namun kenyataannya pada 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak 2012, hasil laporan audit Kota Bandung masih memperoleh opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah dan aset.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan SIKD yang diterapkan pada pemerintahan Kota Bandung melalui penilaian pengguna terhadap variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna serta mengevaluasi pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIKD pemerintah daerah Kota Bandung.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah daerah Kota Bandung, dengan jumlah sampel yaitu 43 responden pengguna SIMDA. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem SIKD pada pemerintahan Kota Bandung tergolong baik, kualitas informasi SIKD pada pemerintahan Kota Bandung tergolong sangat baik, dan kepuasan pengguna atas SIKD pada pemerintahan Kota Bandung sangat baik. Berdasarkan uji simultan diperoleh hasil bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kota Bandung. Berdasarkan uji parsial, kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kota Bandung dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kota Bandung.

Bedasarkan hasil penelitian, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai kualitas SIKD pada wilayah yang lebih luas. Bagi pemerintah daerah Kota Bandung disarankan menelusuri faktor lain yang mengakibatkan masalah pada pengolahan data keuangan terkait pencatatan dan akuntabilitas aset daerah seperti faktor pengawasan logistik.

Kata Kunci : Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kepuasan Pengguna, Sistem Informasi Keuangan Daerah, DeLone & McLean.